

28/12-22

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR PANTAI UJUNG NEGORO BATANG

Mesha Rahma Aurellita , Titik Djumiarti , Dyah Lituhayu
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Diponegoro

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Batang Regency is one of the areas in Central Java Province which has many places, one of which is the Ujungnegoro Beach tourist attraction which is also a conservation area. However, it can be said that the development of tourism in Ujungnegoro Beach has not been maximized, such as the Sapta Pesona program that has not been achieved as stated in the Decree of the Minister of Tourism, Post and Telecommunications Number: KM.5/UM.209/MPPT-89, namely in terms of cleanliness, beauty, coolness and memories, as well as management that is less than optimal, there are limitations in tourism development because these attractions are included in the conservation area. This study aims to determine the implementation of policies in the Ujungnegoro Coastal Park Conservation Area, as well as identify the influencing factors. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation and using domain analysis. Based on the results of the research, it shows that the implementation of tourism development policies at Ujungnegoro Beach has not been fully implemented based on 5 accuracy by Riant Nugroho which has been described in the discussion where the accuracy of the policy has not been maximized. The recommendation in this study is that the tourism office can collaborate to increase the budget so that it can update infrastructure, carry out routine checks on infrastructure and maintain relationships between implementers.

Keywords: Implementation Policy, Tourism Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak tempat wisata terletak pada koordinat 6°5'46" sampai 7°11'47" lintang selatan dan antara 109°40'19" sampai 110°3'6" bujur timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dengan luas daerah 78.864,15 Ha. Batas wilayah Kabupaten Batang adalah sebelah barat berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Pekalongan, sebelah selatan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Batang memiliki destinasi wisata yang terkenal dan sangat potensial untuk dikembangkan salah satunya adalah Pantai Ujungnegoro. Pantai Ujungnegoro terletak di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang merupakan salah satu pantai yang terletak di pesisir utara pulau Jawa. Pantai ini berjarak 5 km ke arah utara dari jalur pantura Semarang-Jakarta

dan terletak 14 km arah timur laut dari Kota Batang, Jawa Tengah. Pantai Ujungnegoro memiliki pantai dengan pasir hitam dan dikelilingi oleh pantai berbatu di sepanjang pantainya. Pantai Ujungnegoro juga memiliki daya tarik yang tinggi di perbukitan di sekitarnya. Selain itu banyak potensi yang bisa dikembangkan di Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang ini, diantaranya adalah potensi wisata, potensi konservasi kelautan dan perikanan, potensi religi dan kearifan lokal, dan potensi ilmiah yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Batang.

Pantai ujungnegoro merupakan salah satu pantai di Kabupaten Batang yang memiliki pendapatan dan jumlah pengunjung yang cenderung meningkat pada setiap tahunnya.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pengunjung Pantai Ujungnegoro Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Pengunjung
2015	61.147
2016	91.739
2017	80.669
2018	76.271
2019	79.994
2020	60.562

Sumber : (Kabupaten Batang Dalam Angka 2021)

Tabel 1. 2 Data Pendapatan Asli Daerah Pengunjung Objek Wisata Pantai Ujungnegoro Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Pendapatan
2017	383.177.750
2018	362.287.250
2019	387.125.000
2020	288.154.50

Sumber : (Kabupaten Batang Dalam Angka 2021, n.d.)

Pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro ini berpedoman pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2031 dan menerapkan program sapta pesona yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM.5/UM.209/MPPT-89 yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan keramahan, dan kenangan.

Sedangkan dalam pengembangannya mengalami keterbatasan karena objek wisata Pantai Ujungnegoro ini masuk di wilayah konservasi pada zona pemanfaatan terbatas, dimana hanya diperuntukkan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan budaya perairan pantai dan/ atau pendidikan. Kawasan konservasi ini berpedoman pada Peraturan Bupati No 47 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut

Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegoro Batang dengan luas mencapai 6.893,75 Ha dan panjang bentang pantai sejauh 17 km. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang menjelaskan bahwa kawasan ini melindungi 3 obyek penting dalam menjaga ekosistem, yaitu: (1) kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumber daya ikan bagi nelayan tradisional; (2) kawasan situs Syekh Maulana Maghribi yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang.

Selain itu, pada pengembangannya harus memerhatikan terkait dengan zonasi Taman Wisata Alam Laut, yang meliputi :

- 1) Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- 2) Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata alam;

- 3) Berdasarkan hal tersebut maka semua pemanfaatan ruang pada daerah Pantai Ujungnegoro-Roban harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

Di samping keindahan serta potensi kepariwisataan, masih terdapat hal-hal yang kurang mendukung program sapta pesona yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor : KM.5/UM.209/MPPT-89 yaitu dalam hal kebersihan, keindahan, kesejukan, dan kenangan, serta pengelolaan yang kurang optimal.

Gambar 1. 1 Pembuangan Sampah Sembarangan di Pantai Ujungnegoro



Sumber : Dokumentasi Peneliti (diambil menggunakan kamera *handphone* pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 10.37 di Pantai Ujungnegoro)

Gambar 1. 2 Gua Aswotomo Kurang Terawat



Sumber : Dokumentasi Peneliti (diambil menggunakan kamera *handphone* pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 10.37 di Pantai Ujungnegoro)

Pada gambar di atas menunjukkan kurangnya kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan pada Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang terutama dalam hal pembuangan sampah. Pengelola sudah mengingatkan tidak membuang sampah sembarangan melalui spanduk yang tertempel di beberapa titik di Pantai Ujungnegoro

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka peneliti menemukan fenomena yang ada diantaranya jumlah pengunjung dan pendapatan yang meningkat, namun dalam pengembangannya masih terbatas karena juga berpedoman pada aturan konservasi dan juga kebersihan dan pengelolaan fasilitas yang belum optimal, masih memerlukan perawatan dan pembaharuan.

Maka dari itu timbullah pertanyaan penelitian, **“bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi**

dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang?.”

Adanya permasalahan dalam pengembangan pariwisata tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang”**, karena Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro merupakan memiliki dua kepentingan yaitu di sektor ekonomi dan politik yang meliputi keuntungan masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Batang dan sebagai salah satu pertahanan dan perlindungan kawasan tersebut

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam kawasan konservasi taman pesisir Pantai Ujungnegoro?
2. Apa sajakah faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan konservasi taman pesisir Pantai Ujungnegoro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan

pariwisata dalam kawasan konservasi taman pesisir pantai Ujungnegoro.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang.

D. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah segala suatu urusan yang dijalankan oleh pemerintah guna menyelesaikan beragam masalah yang ada dalam masyarakat serta untuk menggapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu yang berperan dalam suatu kebijakan tidak hanya pemerintah saja, namun masih ada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial pada suatu proses kebijakan, dimana kegiatannya berupa segala tindakan dari implementor kebijakan untuk menjalankan kebijakan/program yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, karena pada

tahap ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu kebijakan.

Penelitian akan melihat seberapa jauh keberhasilan implementasi tersebut berdasarkan 5 ketepatan dari Riant Nugroho dan mengidentifikasi faktor-faktor dalam implemetasi tersebut berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu proses atau langkah secara bertahap dengan tujuan untuk menciptakan dan menghasilkan pariwisata yang lebih baik lagi kedepannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, secara analisis deskriptif berarti memiliki keterkaitan dengan data untuk variabel suatu penelitian. Data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data resmi yang diperoleh melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, maupun artikel-artikel ilmiah yang memiliki topik serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yakni wawancara,

observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Subjek tersebut meliputi unsur pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran, seperti pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah melalui suatu peraturan atau program-program yang telah disusun sebelumnya, guna mewujudkan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Pada bagian ini akan dijabarkan hasil dan pembahasan terkait implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Batang dilaksanakan berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2031 dan menerapkan program sapa pesona dengan memerhatikan pedoman Peraturan Daerah No. 47 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegoro Batang.

A. Implementasi Kebijakan Pariwisata

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam kawasan konservasi taman pesisir pantai ujungnegoro ini dalam ketepatan pedoman dan regulasi sudah ada yaitu menggunakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2031, selain itu Dinas Pariwisata Kabupaten Batang juga menerapkan sapta pesona dalam pengembangannya sesuai pada Keputusan Menteri Pariwisata No. 5/UM.209/MPPT-89 tentang pedoman penyelenggaraan sapta pesona dan dikarenakan objek wisata pantai ujungnegoro ini masuk kedalam wilayah zonasi konservasi pemanfaatan terbatas dimana hanya diperuntukkan pariwisata dan rekreasi, penelitian dan budidaya perairan pantai, serta pendidikan maka harus mengikuti pedoman dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan yaitu Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKLD)/Taman Pesisir Ujungnegoro. Dalam pengembangannya sudah sesuai dengan pedoman-pedoman yang

ada, tetapi masih ada hal-hal yang kurang mendukung program sapta pesona pada unsur kebersihan yang akan memengaruhi unsur lain dan juga dapat merusak wilayah konservasi dengan keadaan pantai yang kotor atau banyak sampah yang berserakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan mendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pelaksana dalam kebijakan pengembangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang sudah tepat yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dibantu oleh kelompok masyarakat sekitar dan investor. Selain itu dapat diketahui bahwa pihak-pihak formal yang terlibat memiliki perannya masing-masing dalam membantu pelaksanaan pengembangan pariwisata di kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang. Seperti dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berperan dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang, Dinas Kelautan Perikanan

dan Peternakan sebagai Pengelola Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujunggoro Batang, kelompok masyarakat dan juga investor. Semua pihak tersebut saling berperan dan mendukung satu sama lain demi terlaksanakannya pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujunggoro Batang. Maka dari itu perlu adanya proses interaksi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan agar saling berkesinambungan.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target dari pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujunggoro Batang di atas bisa dibilang sudah tepat target, tujuan dari pengembangan pariwisata di kawasan konservasi taman pesisir ini sudah selaras atau tidak mengalami tumpang tindih yaitu untuk mengembangkan pariwisata dan juga melestarikan objek wisata tersebut dimana juga merupakan kawasan konservasi. Hal tersebut juga sejalan dengan sasaran yang ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2017, antara lain yakni meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan,

meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan juga adanya peran serta dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata tersebut. Pada pelaksanaannya tujuan dan sasaran tersebut sudah tercapai tetapi pada dua tahun belakang ini mengalami penurunan dikarenakan semua pariwisata yang ada di Kabupaten ditutup akibat adanya covid-19.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam pengembangan pariwisata dalam kawasan konservasi taman pesisir pantai ujunggoro ini sudah tepat. Hubungan atau komunikasi yang dilakukan bukan hanya dengan lingkup dinas saja melainkan dengan masyarakat dan stakeholder lainnya seperti pokdarwis dan pokmaswas, komunikasi dan koordinasi antar pelaksana sudah terjalin dua arah dan berjalan dengan baik. Selain itu juga sering diadakan pertemuan atau pelatihan kepada pokdarwis dan pokmaswas oleh dinas terkait.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dapat menunjukkan bagaimana pelaksana merespon dan melaksanakan

kebijakan tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak, dan apakah ada hambatan sebagai pelaksana kebijakan tersebut yang kemudian dapat dievaluasi untuk memperbaiki kedepannya.

Mengenai pemahaman pedoman kebijakan setiap dinas atau organisasi pelaksana terkait sudah mengkoordinasikan mengenai adanya kebijakan tersebut agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dengan satu pemahaman dan satu tujuan. Akan tetapi untuk pengelola disana ternyata tidak mengetahui pedoman kebijakan pada pelaksanaan pengembangan pariwisata tersebut karena mereka hanya menunggu arahan arahan dari dinas.

Selain itu, pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengembangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang sudah direspon dan dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang sudah berjalan dengan normal setelah adanya pandemi yang mengharuskan semua pariwisata

yang ada di Kabupaten Batang ditutup. Sedangkan, pelaksanaan wilayah konservasi sendiri masih berjalan samapai sekarang dibantu oleh pokmaswas untuk mengawasi kawasan konservasi tersebut. Masing-masing dinas menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Kabupaten Batang dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang mengaturnya. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan yang muncul dari beberapa masyarakat seperti asumsi negatif dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan wilayah tersebut. Hambatan yang lain berupa fenomena alam seperti abrasi dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan

1. Sumber Daya

Peran sumber daya dalam implementasi kebijakan ini sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilannya. Dalam hal sumber daya finansial disini masih mengalami keterbatasan apalagi

pada masa pandemi dimana terjadi refocusing anggaran untuk covid-19. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan terhambatnya pengembangan untuk pembangunan fisik seperti fasilitas dan aksesibilitas pada objek wisata tersebut menjadi kurang terawat. Sedangkan untuk sumber daya manusianya pada dinas pariwisata dan dinas kelautan sudah memadai untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Selain itu dinas dibantu oleh sekelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis), kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan beberapa stakeholder yang bertugas untuk membantu dinas jika ada masukan dari masyarakat, membantu mempromosikan wisata serta membantu mengawasi dan melestarikan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro tersebut. Kemudian untuk kualitas sumber daya manusianya rata-rata lulusan sarjana, hanya saja masih banyak yang tidak sesuai dengan bidang lulusannya.

2. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam proses komunikasi dan penyampaian informasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan

wawancara Dinas pariwisata dan dinas kelautan melakukan interaksi dan penyampaian informasi secara langsung melalui rapat atau diskusi selain itu juga memanfaatkan media online seperti whatsapp dan telegram seiring berkembangnya jaman.

Selain itu dalam proses komunikasi terdapat hambatan atau konflik yang dapat menghambat pekerjaan. Adanya permasalahan dalam proses komunikasi dapat menghambat keberlangsungan pelaksanaan suatu program kerja seperti yang dialami oleh bidang destinasi wisata Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang. Maka dari itu jika terdapat hambatan atau konflik dalam komunikasi harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pekerjaan.

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Komunikasi dan koordinasi yang tidak baik maka akan menghambat jalannya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegoro Batang.

3. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Ketiga aspek eksternal tersebut yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik saling berkaitan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya dukungan dari masyarakat, dan pemerintah. Dalam pengembangan Pariwisata Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegero Batang, sejauh ini didukung oleh masyarakat dan pemerintah hanya saja ada beberapa masyarakat yang belum menyadari pentingnya kegiatan pariwisata dan masih adanya pandangan buruk masyarakat terhadap tempat wisata.

Maka dari itu peran pemerintah disini juga penting untuk melakukan upaya mengubah mindset masyarakat yang mempunyai jiwa sadar wisata. Akan tetapi, pada aspek ekonomi disini masih mengalami kendala keterbatasan anggaran yang dapat menghambat Dinas untuk melakukan proses pengembangan pariwisata Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegero Batang.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegero Batang belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Ditunjukkan dalam pengembangannya masih ada hal-hal yang kurang mendukung program sapta pesona pada unsur kebersihan yang akan memengaruhi unsur lain dan juga dapat merusak wilayah konservasi dengan keadaan pantai yang kotor atau banyak sampah yang berserakan.

Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong adanya pengembangan pariwisata di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegero Batang, antara lain sudah tercukupinya sumber daya manusia pelaksana kebijakan, komunikasi yang terjalin antar pelaksana sudah dua arah, adanya partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini seperti adanya kurangnya anggaran, kurang baiknya kualitas sarana dan prasarana di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Ujungnegero Batang.

SARAN

- 1) Perlunya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pedoman kebijakan yang digunakan dalam

- pengembangan pariwisata kepada pihak formal maupun informal seperti pokdarwis dan pengelola objek wisata
- 2) Perlunya menjaga proses interaksi dan koordinasi antar pelaksana secara baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menghambat pekerjaan;
 - 3) Perlunya memaksimalkan hubungan kerja sama dengan investor sehingga dapat meminimalisir keterbatasan anggaran;
 - 4) Perlunya melakukan pembaharuan dan perawatan sarana prasarana objek wisata secara rutin;
 - 5) Perlunya melakukan pengecekan secara rutin pada fasilitas yang ada seperti pada fasilitas kamar mandi, agar kebersihan dan kebutuhan air bagi wisatawan dapat terpenuhi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dr. Dra. Karmanis, M.Si. Karjono. ST., M. (2020). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (H. Ibda (Ed.)). CV. Pilar Nusantara.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Jurnal :**
- Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*.
[Http://Repository.Unimal.Ac.Id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.Pdf](http://Repository.Unimal.Ac.Id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.Pdf)
- Afridho, R. M., & Priyono, K. D. (2019). Analisis Potensi Objek Wisata Alam Di Kabupaten Batang. *Analisis Potensi Objek Wisata Alam Di Kabupaten Batang*.
- Gayatri, I. A. D. L. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Nusa Penida Di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali*.
- Londa, V. Y. (N.D.). *Kombi Di Kabupaten*

- Minahasa Provinsi Sulawesi Utara*
Litha Maria Tanod William A .
Areros Implementation Of Kombi
Beach Natural Tourism Object
Management Policy In Minahasa
Regency , North Sulawesi Province.
26–41.
- Meray, J. G., Takumansang, E. D.,
Universitas, K., Ratulangi, S.,
Pengajar, S., Arsitektur, J., Sam, U.,
Manado, R., Berkelanjutan, P.,
Kakas, K., Minahasa, K., & Pesona,
Y. (2016). Partisipasi Masyarakat
Terhadap Pengembangan Pariwisata
Pantai Mahembang Kecamatan
Kakas. *Spasial*, 3(3), 47–55.
- Rosardi, R. G. (2019). Model Pentahelix
Dalam Pengembangan Pariwisata
Berkelanjutan Di Kabupaten Batang
Jawa Tengah. *Jurnal Riset, Inovasi*
Dan Teknologi, 4, 7–21.
- Septiwirawan, R., Arifin, M. Z., Zulfiani,
D., Berau, P. K., Berau, P. K.,
Kreatif, E., Konservasi, Y., Swasta,
P., & Bahari, W. (2020). Upaya
Pengembangan Wisata Bahari Di
Pulau Maratua Oleh Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Berau.
- Simbolon, Y. N., Nadiyah, R. S., Claretta,
D., Prastiyanti, E., Chandra, B. S., &
Ardiyanto, B. (n.d.). *Implementasi*
Pengeolaan Pariwisata (Suwandoko
dkk) Halaman 76. 76–97.
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A.
T. (2021). Implementasi Kebijakan
Pengembangan Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat. *Publik:*
Jurnal Manajemen Sumber Daya
Manusia, Administrasi Dan
Pelayanan Publik, 8(1), 79–90.
<https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.1>
63

Peraturan

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017
Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisata Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2017-2031,

Keputusan Menteri Pariwisata No.
5/UM.209/MPPT-89 tentang
pedoman penyelenggaraan sapta
pesona

Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Kawasan
Konservasi Laut (KKLD)/Taman
Pesisir Ujungnegoro.